

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH, TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**

(STUDI KASUS PADA SKPD KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2019)

***THE EFFECT OF COMPETENCE OF HUMAN RESOURCES, GOVERNMENT
INTERNAL CONTROL SYSTEM AND REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING
SYSTEMS TO THE QUALITY OF REGIONAL FINANCIAL STATEMENTS
(STUDY ON WORK UNITS DISTRICT OF INDRAMAYU 2019)***

Yunita Putri Hadiyati¹, Dini Wahjoe Hapsari, S.E., M.Si., Ak., CA², Tri Utami Lestari, S.E., M.Ak³

¹Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University

¹yunitahadputri14@gmail.com, ²dinihapsari@telkomuniversity.ac.id, ³triutamilestari88@gmail.com

Abstrak

Laporan keuangan daerah merupakan faktor penting bagi pemerintah yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan dan merupakan sebuah media bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan keuangan daerah yang berkualitas dapat membantu pemerintah membuat dan mengambil keputusan yang akan membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik pengaruh secara parsial maupun secara simultan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dan bersifat kausalitas. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/ keuangan pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indramayu. Teknik penentuan sampel menggunakan metode sampling sensus, dimana semua populasi dijadikan sample yakni sebanyak 96 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis serta didahului dengan uji asumsi klasik dengan menggunakan *software* IBM SPSS versi 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Secara Parsial Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, maka untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik yaitu disarankan agar SKPD meningkatkan serta menambah kompetensi sumber daya manusia yaitu dengan cara memperkerjakan atau menerima pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, serta menerapkan sistem pengendalian internal yang baik dalam menciptakan suasana kerja yang baik, agar tugas yang dilaksanakan/ penyajian laporan keuangan akan semakin baik/berkualitas.

Kata kunci : Kompetensi SDM, Kualitas LKPD, SAKD, SPIP

Abstract

Regional financial statements are an important factor for the government that must be considered in presenting financial statements and is a medium for the government to account for its financial performance to the public. Quality regional financial reports can help the government make and make decisions that will bring the government to a better direction.

His study was conducted to determine the effect of HR Competence, Government Internal Control System, Regional Financial Accounting System, on the Quality of Local Government Financial Reports both in partial and simultaneous influence.

This research is included in the type of descriptive research and is causal. The population in this study were employees of the accounting / finance section of the Regional Performance Unit of Indramayu Regency. The sample determination technique uses the census sampling method, where all populations are sampled as many as 96 people. The data used in this study were analyzed using multiple linear regression analysis and hypothesis testing and was preceded by a classic assumption test using IBM SPSS version 25.

The results showed that simultaneously HR Competencies, Government Internal Control Systems, and Regional Financial Accounting Systems had an effect on the Quality of Local Government Financial Reports. Partially HR Competencies and Government Internal Control System (SPIP) do not significantly influence the Quality of Local Government Financial Reports, Regional Financial Accounting Systems have a significant effect on the Quality of Local Government Financial Reports.

Based on the results of the study, to improve the quality of good local government financial reports, it is recommended that SKPD improve and increase the competence of human resources by employing or receiving employees with accounting education backgrounds, and implementing a system of internal control that is good at creating a working atmosphere. good, so that the tasks carried out / presentation of financial statements will be better / better quality.

Keywords: *Competence of Human Resources, Government Internal Control System, Quality of Regional Financial Statements, Regional Financial Accounting System*

1. Pendahuluan

Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), kepala daerah yang menyerahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala SKPD, pada akhirnya akan meminta kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa laporan keuangan. Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) disebut sebagai entitas akuntansi (*accounting entity*). Sebagai entitas akuntansi (*accounting entity*) Satuan Kinerja Perangkat Daerah harus melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan (yang mencakup anggaran dan barang, diiringi dengan dana yang dikelola oleh bendahara fungsional). Pertanggungjawaban atas uang/kas yang ada di SKPD dikelola oleh bendahara pengeluaran selaku penjabat fungsional (Pasal 14 Pemendagri 13 Tahun 2013)^[1]. Kabupaten Indramayu memiliki 32 SKPD yang terdiri dari Asisten, Bagian-bagian, Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat dan RSUD.

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010^[2], laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Komponen dari LKPD tersebut diantaranya: Laporan Realisasi APBD (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan CALK. LKPD yang berkualitas dapat menunjukkan bahwa SKPD tersebut telah melaksanakan fungsi eksekutif organisasi dengan baik. Selanjutnya, dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas LKPD yang diterbitkan atau disusun oleh SKPD harus memenuhi karakteristik-karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam PP No.71 tahun 2010^[2]. Karakteristik ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar LKPD dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, karakteristik-karakteristik tersebut menurut PP No. 71 Tahun 2010^[2] yaitu relevan, andal dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Pemerintah daerah sudah seharusnya meningkatkan kualitas LKPD, yang mengandung informasi yang berguna untuk berbagai pihak, dan LKPD yang berkualitas dapat mewujudkan transparansi, akuntabilitas publik Pemerintah Daerah (PEMDA). Karena laporan keuangan yang baik mencerminkan kondisi pemerintahan yang baik pula.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016)^[3] menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan diantaranya Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pengendalian Intern Pemerintah. Berikut adalah faktor yang diindikasikan dapat mempengaruhi dari kualitas LKPD diantaranya yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD),. Selanjutnya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), secara parsial dan simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan alat bantu kuesioner. Populasi penelitian sebanyak 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa Dinas, Badan, dan Kantor di Kabupaten Indramayu dengan jumlah sampel 96 responden yang terdiri dari kepala sub bagian keuangan beserta seluruh staf/pegawainya. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *Census Sampling*.

2. DASAR TEORI DAN METODOLOGI

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam PP No. 71 Tahun 2010^[2] tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Tanjung (2014:12)^[4] menyatakan pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Dalam penelitian Ihsanti (2014)^[5], untuk mengukur laporan keuangan yang berkualitas menggunakan pengukuran apakah laporan keuangan tersebut sudah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi dan kinerja SDM menyangkut kewenangan setiap pegawai untuk melaksanakan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan perannya dalam organisasi, yang sesuai dengan keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya (Torang, 2014:186)^[6]. Undang-undang nomor 13 Tahun 2013^[7] tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan

Agar dapat mengelola kinerja yang efektif, sangat penting mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan kinerja pegawai. Kinerja pegawai mencerminkan perilaku pegawai di tempat kerja sebagai penerapan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan yang memberikan kontribusi atau nilai terhadap tujuan organisasi (Kaswan, 2015:152)^[8].

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

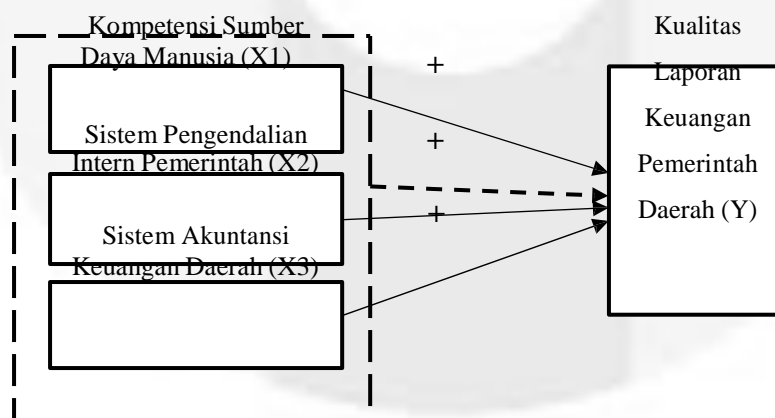
Dalam PP No. 60 Tahun 2008^[9] dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP merupakan suatu langkah nyata pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.

Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini digunakan, terdapat unsur-unsur SPIP yang bersumber dari PP No. 60 Tahun 2008^[9] yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan kegiatan pengendalian.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Menurut Sujarweni (2015:158)^[10] menjelaskan akuntansi keuangan daerah adalah aktivitas jasa yang terdiri dari pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas PEMDA (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak eksternal PEMDA.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ihsanti (2014)^[5] mengukur penerapan SAKD dengan indikator PP No. 71 Tahun 2010^[2] dengan melihat apakah PP tersebut apakah sudah diterapkan dalam instansi atau tidak. Dengan demikian maka, penerapan SAKD dari PP No. 71 Tahun 2010^[2] yaitu dilihat dari : 1. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan SAP. 2. Proses akuntansi di SKPD sesuai dengan prosedur akuntansi keuangan daerah.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- Berpengaruh secara parsial
 -----→ Berpengaruh secara simultan

3. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa Dinas dan Badan di Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *census sampling* dengan total sampel 96 responden yang terdiri atas kepala sub bagian keuangan berupa seluruh staf atau pegawainya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linier berganda dengan bantuan *software* IBM SPSS versi 25.

4. Pembahasan

1. Uji Asumsi Klasik

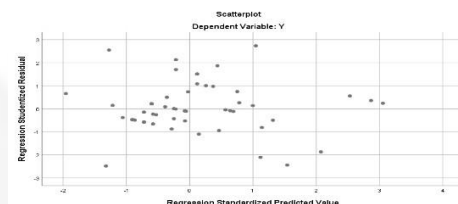
a. Uji Normalitas

Pada uji normalitas didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,200 diatas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut dapat digunakan karena variabel residual terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Pada uji multikolinearitas didapatkan nilai *tolerance* pada semua variabel independen lebih dari 0,1 dan VIF kurang 10, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1

Diagram Scatterplot Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer yang telah diolah SPSS 25.0 (2019)

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa model *Scatterplot* menunjukkan titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hal ini menandakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, oleh karena itu model regresi layak dipakai untuk memprediksi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan masukan variabel independen Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

1. Uji Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya suatu pengaruh dari variabel-variabel bebas (X) secara bersama-sama atas suatu variabel tidak bebas (Y) digunakan uji F. Hasil pengujian hipotesis secara simultan dengan menggunakan SPSS Versi 25.0 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

		ANOVA ^a				
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	113,159	3	37,720	6,744	,001 ^b
	Residual	324,389	58	5,593		
	Total	437,548	61			

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD

b. Predictors: (Constant), SAKD, SPIP, Kompetensi SDM

Sumber: Data Primer yang telah diolah SPSS 25.0 (2019)

Berdasarkan tabel 1 diatas, didapat nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 atau $0,001 < 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari α (0,05), maka H_0 ditolak yang artinya secara simultan terdapat pengaruh signifikansi antara variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.

2. Uji Parsial (Uji t)

Analisis pengaruh parsial digunakan untuk mengetahui seberapa erat pengaruh masing-masing variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Dengan bantuan program SPSS Versi 25.0 maka dapat diperoleh nilai uji parsial (uji t) sebagai berikut ini:

Tabel 2 Hasil Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28,949	7,171		4,037	,000
	Kompetensi SDM	-,195	,193	-,145	-1,009	,317
	SPIP	,225	,169	,165	1,332	,188
	SAKD	,457	,127	,506	3,592	,001

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD

Sumber: Data Primer yang telah diolah SPSS 25.0 (2019)

Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 atau $0,001 < 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari α (0,05), maka H_0 ditolak yang artinya secara simultan terdapat pengaruh signifikansi antara variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang artinya semakin tinggi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka akan semakin tinggi pula laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014)^[11] dan Kiranayanti *et.al* (2016)^[12] yang menyatakan bahwa Kompetensi SDM, SPIP, dan SAKD secara simultan mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada tabel 2 diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,317 diatas 0,05, sehingga H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak, yang berarti secara parsial variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya jika Kompetensi Sumber Daya Manusia baik belum tentu Kualitas Laporan Keuangan baik pada SKPD di Kabupaten Indramayu. Jika dikaitkan dengan Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak memiliki pengaruh.

Selain dari demografi responden tersebut, hasil pengujian statistik deskriptif mengenai tanggapan responden terkait dengan indikator pengetahuan (*knowledge*) yang memperoleh skor 77% lebih rendah dari indikator kemampuan dan indikator perilaku yang memperoleh skor 87%. Dari 74 responden yang menjawab pada indikator pengetahuan 18% diantaranya menyatakan bahwa responden ragu-ragu jika responden tersebut memahami tentang teori keuangan, akuntansi dan pengetahuan lainnya. Dengan adanya sumber daya yang belum memahami sepenuhnya teori keuangan, akuntansi dan pengetahuan lainnya, akan menyebabkan pengaruh terhadap implementasi pengetahuan (*knowledge*) tentang laporan keuangan yang belum sepenuhnya dipahami oleh pegawai bagian keuangan di SKPD Kabupaten Indramayu. Hal ini menyebabkan variabel Kompetensi SDM dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hasibuan (2018)^[13] yang menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada tabel 2 diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0.188 atau diatas 0.05 sehingga H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak, yang berarti secara parsial variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Kabupaten Indramayu. Artinya jika SPIP tidak diterapkan dengan baik pada SKPD Kabupaten Indramayu, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan kurang berkualitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yensi *et.al* (2014)^[14] yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Alasannya adalah sistem pengendalian intern menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi laporan keuangan

pemerintah daerah sejalan dengan masih banyaknya temuan BPK atas lemahnya sistem pengendalian intern yang mengakibatkan kebocoran dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga BPK memberi opini Tidak Wajar (TW) bahkan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas sebahagian besar LKPD di Indonesia. Sehingga masih perlunya peningkatan terhadap sistem pengendalian intern, karena apabila semakin baik sistem pengendalian intern maka akan berdampak meningkatnya kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada tabel 2 diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,001 dibawah 0,05 sehingga H_0 ditolak, dan H_a diterima. Artinya, variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Kabupaten Indramayu. Artinya semakin tinggi SAKD, maka akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Makoginta *et.al* (2017)^[14], Andini *et.al* (2015)^[15], dan Putra *et.al* (2013)^[16] yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Alasannya adalah karena pada dasarnya sistem akuntansi adalah suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019)”, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang dilihat dari pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dari hasil tanggapan responden yang dikategorikan menjadi sangat tidak baik, tidak baik, cukup, baik dan sangat baik:
 - a. Kompetensi Sumber Daya Manusia pada bagian keuangan di SKPD Kabupaten Indramayu berada di katagori kompeten, yaitu sebesar 82% yang dapat diartikan bahwa pegawai bagian keuangan pada SKPD Kabupaten Indramayu telah mempunyai kemampuan dalam bekerjasama dengan anggota tim atau pegawai lainnya, mampu bertanggung jawab atas segala pekerjaan yang telah diselesaikan dan para pegawai mampu mematuhi aturan yang berlaku didalam pekerjaan.
 - b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada bagian keuangan di SKPD Kabupaten Indramayu berada di katagori baik, yaitu sebesar 82% yang dapat diartikan bahwa pimpinan selalu mengevaluasi temuan yang menunjukan adanya kelemahan dan perbaikan serta transaksi yang terjadi dalam instansi selalu di dokumentasikan.
 - c. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada bagian keuangan di SKPD Kabupaten Indramayu berada pada katagori sangat baik, yaitu sebesar 86% yang dapat diartikan bahwa pegawai bagian keuangan di SKPD Kabupaten Indramayu sudah menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang menyajikan informasi secara lengkap dan secara menyeluruh sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah mengenai kebijakan akuntansi keuangan pemerintah daerah dan mekanisme penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) serta Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berbasis akrual di Indonesia yang harus diterapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
 - d. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada bagian keuangan di SKPD Kabupaten Indramayu berada pada katagori sangat berkualitas, yaitu sebesar 85% yang dapat diartikan pegawai ataupun karyawan sudah mengimplementasikan 4 indikator sesuai dengan PP No 10 Tahun 2010 yang merupakan karakteristik dari laporan keuangan yang berkualitas.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan diketahui bahwa Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada bagian keuangan Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019.
3. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial, diperoleh bahwa:
 - a. Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada bagian keuangan Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019.
 - b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada bagian keuangan Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019.

- c. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada bagian keuangan Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019.

Saran

Setelah peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019), maka peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
 - a. Peneliti selanjutnya, diharapkan bisa memperluas objek penelitian dan menambah jumlah sampel penelitian pada Pemerintah Daerah lain yang memiliki masalah dalam pengelolaan keuangan daerah, baik secara fakta lapangan maupun dari opini audit yang dikeluarkan.
 - b. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambah waktu penelitian, dan menambah alat pengumpulan data seperti melakukan wawancara secara langsung pada para pegawai bagian keuangan guna mendapatkan informasi yang lebih akurat.
 - c. Menambahkan atau menggunakan variabel lain untuk diuji, yang tidak terdapat pada penelitian ini sesuai dengan fenomena yang terjadi pada Pemerintah Daerah yang akan diteliti.
 - d. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan pembelajaran serta dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya.
2. Aspek Praktis

SKPD Kabupaten Indramayu agar dapat meningkatkan serta menambah kompetensi sumber daya manusia yaitu dengan cara menempatkan pegawai pada bagian keuangan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Serta mengadakan pelatihan di bidang keuangan untuk para pegawai yang berasal dari pendidikan non akuntansi. Hal tersebut guna meningkatkan kualitas SDM yang ada, dan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Semakin kompeten SDM yang dimiliki maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berkualitas.

Daftar Pustaka

- [1] Republik Indonesia. Pemendagri No. 13 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara. (Online). (25 Februari 2019).
- [2] Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. (Online). (25 Februari 2019).
- [3] Yuliani, N. L., & Agustini R.D. (2016). *Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. NASSP Bulletin, 32(153), 256-256. <https://doi.org/10.1177/019263654803215331>.
- [4] Tanjung, A. H. (2014). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Bandung: Alfabeta.
- [5] Ihsanti, Emilda. (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- [6] Torang, S. (2014). *Organisasi & Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- [7] Republik Indonesia. Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan. (Online). (25 Februari 2019).
- [8] Kaswan, A. (2015). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- [9] Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (Online). (25 Februari 2019).
- [10] Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- [11] Nurillah, A. S. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol.1, No.1 Hal:2337-3806.
- [12] Kiranayanti, I., & Ni Made Adi Erawati. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemahaman atas Regulasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. *ISSN: 2302- 8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 16.2. Agustus (2016): 1290-1318.*

- [13] Hasibuan, Syarifah Hanum. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5679> .
- [14] Yensi, D., Amir Hasan, & Yuneita Aneisma. (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.* JOM FEKON Vol.1 No. Oktober 2014.
- [15] Andini, D., & Yusrawati. (2015). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.* Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi I Vol.24 No.1 Juni 2015.
- [16] Putra, Bayu Dharma dan SyamsulAmar. (2013). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.*